

Edisi II Tahun 2006



Buletin **NAGARI**

Dinamika Nagari Dari Masa ke Masa



Rekonstruksi Ekonomi Nagari

Perkebunan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

Ira Wahyuni Syarfi

Dosen Fakultas Pertanian,
dan Mahasiswa Pascasarjana (S3) Unand Padang



Kesadaran akan pentingnya pergeseran perspektif pendekatan pembangunan dari yang berorientasi pertumbuhan (*growthoriented development*) ke yang berorientasi masyarakat (*peopleoriented development*) telah demikian tumbuh sejak lebih dari tiga dekade lalu. Legitimasi pentingnya pergeseran ini, terutama sekali setelah semakin nyata dampak-dampak negatif dari implementasi pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, terutama yang menyangkut masalah ketidakadilan, kerusakan lingkungan, degradasi sumber daya alam dan juga disintegrasi sosial (Korten, 1983).

Salah satu sektor ekonomi yang paling banyak bersentuhan dengan mayoritas rakyat di Indonesia adalah sektor pertanian, dan perkebunan rakyat merupakan salah satu sub-sektor. Perkebunan rakyat dicirikan oleh berbagai kelemahan antara lain; diusahakan di lahan yang relatif sempit dengan cara tradisional, produktivitas dan mutu rendah, posisi dalam pemasaran hasil lemah. Sebaliknya perkebunan besar diusahakan secara modern, dengan teknologi maju (Mubyarto, 1985: 72).

Petani kecil (rakyat) sering dianggap sebagai suatu titik kelemahan dalam perkembangan hasil produksi tanaman perkebunan. Kualitas mereka dan hasil produksinya dianggap rendah menurut standar pasar dunia, kontinuitas hasil produksinya pun tidak teratur, akhirnya peningkatan kesejahteraan petani perkebunan sulit

tercapai. Namun demikian perkebunan rakyat memiliki peran penting, bila dilihat dari; 1) secara keseluruhan kontribusinya terhadap penerimaan devisa dari subsektor perkebunan masih dominan; 2) PDB dari perkebunan rakyat lebih tinggi dari perkebunan besar, dan 3) Perkebunan rakyat jauh lebih luas dari perkebunan besar kecuali untuk komoditi kelapa sawit (Syarfi, 2004).

Program khusus pembangunan perkebunan rakyat di Sumatera Barat telah dimulai pada tahun 1973/74, dengan diperkenalkannya pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), meliputi beberapa proyek, yaitu UPP-PRPTE (Rehabilitasi Tanaman Ekspor, UPP-Berbantuan P3RSB (Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat), UPP-TCSDP atau Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat, dan UPP Parsial atau bantuan input parsial. Pada tahun 1977/78 pemerintah memperkenalkan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) dalam berbagai proyek, yaitu; PIR-Berbantuan Ophir, PIR-Khusus (PIR-SUS), PIR-Lokal, dan PIR-Trans, serta PIR Anak angkat Bapak Angkat (PIR-ABA).

Meskipun telah berbagai program dan proyek pembangunan perkebunan rakyat dilaksanakan, realitasnya petani perkebunan rakyat di Sumatera Barat masih miskin. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani tanaman perkebunan hanya Rp 12.457.000,-/th/rt dan hanya Rp 7.990.000/th/rt yang berasal dari perkebunan

Berdasarkan keberhasilan pola PIR-Berbantuan Ophir dan PIR-Trans di Sumatera Barat dalam meningkatkan pendapatan petani, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan perkebunan rakyat dapat merupakan salah satu usaha mengentaskan kemiskinan di Sumatera Barat.



atau 888 US\$/th/rt (jika 1US\$=Rp 9000), sisanya merupakan sumbangan dari buruh dan luar pertanian (BPS Sumbar, 2003). Jika kita bandingkan dengan target pembangunan perkebunan, yaitu petani pekebun berpendapatan 1500 US\$/th/rt maka terlihat pendapatan total petani pekebun secara umum tidak mencapai target tersebut.

Namun demikian secara khusus di Sumatera Barat telah terdapat keberhasilan pola PIR-Berbantuan Ophir di Pasaman dalam meningkatkan pendapatan petani dan menumbuhkan kelembagaan petani yaitu kelompok tani dan KUD serta KJUB (laporan Ditjenbun 1996, Sutrisno, 1995). Disamping itu penelitian Syarfi (2003 dan 2004) terhadap petani peserta proyek berbagai pola PIR di Sumatera Barat menemukan bahwa untuk peserta PIR-Trans di Timpeh Kabupaten Dharmasraya target pendapatan 1500 US\$/th/rt umumnya tercapai (83% dari sampel). Peningkatan pendapatan petani plasma juga telah diiringi oleh peningkatan kesejahteraan petani, yang dapat ditunjukkan dengan indikator: rumah tinggal (sebagian besar petani telah mengembangkan rumah asli), adanya sarana pendidikan SD dan kesehatan

atau Balai Pengobatan dilokasi, serta tabungan dan kemampuan petani memiliki barang rumah tangga/elektronik; televisi, radio, sepeda dan sepeda motor.

Masalah dan kendala pembangunan perkebunan rakyat pada berbagai pola PIR adalah: (a) koperasi petani belum mampu mengembangkan usaha koperasi, menyusun rencana yang riil dan melaksanakannya, (b) program pembangunan masyarakat sekitar yang bersifat insidental belum dapat meredakan konflik atau kecemburuan antara masyarakat dengan pihak perkebunan inti, dan (c) tersingkirnya hak ulayat dan diakuinya hak milik, serta (d) keinginan masyarakat sekitar untuk dibuatkan kebun plasma/anak angkat tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan inti karena tidak tersedianya 'fasilitas kredit lunak', (e) pengembangan perkebunan rakyat dengan pola anak angkat realisasinya hanya sekitar 30% kebun rakyat dan 70% kebun inti. Hal ini merupakan gambaran bahwa implementasi kebijakan pembangunan perkebunan rakyat belum memberikan manfaat terbesar bagi rakyat petani pekebun secara umum (Syarfi, 2005).

Berdasarkan keberhasilan pola PIR-Berbantuan Ophir dan PIR-Trans di Sumatera Barat dalam meningkatkan pendapatan petani, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan perkebunan rakyat dapat merupakan salah satu usaha mengentaskan kemiskinan di Sumatera Barat. Namun demikian permasalahan pembangunan perkebunan rakyat di Sumatera Barat adalah; 1) sedikitnya proporsi luas kebun rakyat yang dibangun pada pola anak angkat (30% plasma dan 70% inti), 2) komoditi utama perkebunan rakyat belum mendapat perhatian utama. Hal kedua ini tergambar dari komoditi utama yang dikembangkan dalam pembangunan perkebunan oleh pemerintah di Sumatera Barat adalah kelapa sawit dan kakao, sedangkan lima komoditi utama yang diusahakan rakyat adalah; karet,

Jika pemerintah daerah Sumatera Barat berhasil mendorong perusahaan perkebunan swasta untuk membangun kebun plasma 80% dan kebun inti 20% maka akan terdapat kebun plasma kelapa sawit di Sumatera Barat seluas 600.000 ha. Artinya akan ada sekitar 300.000 petani yang akan ikut serta menjadi petani plasma.

kelapa dalam, cassia vera, kopi dan gambir (lihat statistik perkebunan Sumbar). Hal ini menunjukkan bahwa komoditi perkebunan yang dikembangkan pemerintah tidak seiring dengan komoditi perkebunan rakyat yang ada. Kelapa sawit merupakan komoditi utama untuk HGU yang dikeluarkan pemerintah daerah Sumatera Barat (lihat laporan dinas perkebunan sumbar 2004) dan kakao merupakan komoditi yang dicanangkan pemerintah tahun 2006 untuk dikembangkan seluas 100.000 ha di Sumatera Barat.

Berdasarkan dua masalah pokok di atas maka dikemukakan dua strategi yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Sumatera Barat melalui pengembangan perkebunan rakyat. **Pertama**

adalah mendorong perusahaan perkebunan besar yang ada di Sumatera Barat untuk membangunkan kebun plasma seluas 80% dan kebun inti 20%, sesuai dengan ketentuan awal pola PIR - B u n

dicanangkan di Indonesia (lihat kumpulan keputusan Menteri pertanian dan Direktur jenderal perkebunan untuk landasan operasional proyek-proyek PIR Perkebunan, 1986). Dengan proporsi seperti ini eksistensi kebun plasma dan kebun inti diharapkan dapat bersifat simbiose mutualistis atau saling memerlukan (meminjam istilah Geertz, 1976).

Jika pemerintah daerah Sumatera Barat berhasil mendorong perusahaan perkebunan swasta untuk membangunkan kebun plasma 80% dan kebun inti 20% maka akan terdapat kebun plasma kelapa sawit di Sumatera Barat seluas 600.000 ha. Artinya akan ada sekitar 300.000 petani yang akan ikut serta menjadi petani plasma.

Kedua, adalah komoditi unggulan yang dikembangkan pemerintah seyogyanya sejalan dengan komoditi utama rakyat yaitu karet, kelapa dalam, cassia vera, kopi dan gambir (dari 150.824 ha karet di Sumatera Barat 145.979 ha adalah karet rakyat, lihat Statistik perkebunan Sumbar). Strategi kedua ini merupakan usaha pemerintah berpartisipasi aktif membangun petani perkebunan rakyat tanpa berharap kepada 'kedermawanan perusahaan perkebunan besar'.

Untuk itu pemerintah dapat menjalankan fungsinya "sebagai pelayan rakyat" dalam membangun perkebunan rakyat, yaitu dengan: 1) menyediakan input atau faktor produksi terutama bibit unggul karet, dll yang sesuai dengan agroklimat setempat, pupuk yang tepat waktu dan jumlahnya di setiap nagari yang ada di Sumatera Barat. Hal ini perlu dilakukan mengingat segala keterbatasan rakyat petani pekebun (pendidikan, keterampilan, produktifitas, dll yang rendah) dan potensinya (jumlah dan luas lahan yang tinggi); 2) pemerintah juga berkewajiban membina petani dalam pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk pengolahan hasil kemitraan dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi sangat diperlukan.

Dalam hal pemasaran hasil informasi pasar dan jaminan pasar perlu dukungan pemerintah pada tahap awal menjelang lembaga petani perkebunan mampu untuk hal tersebut: 3) untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan perlu dilakukan bimbingan pengembangan kelembagaan petani dalam hal; pengembangan usaha dari penyediaan input; bibit unggul, pupuk, transportasi sampai pemasaran hasil. Kelembagaan utama yang akan terlibat adalah Dinas perkebunan dan Perindustrian dan perdagangan, Perguruan tinggi serta Perbankan.

Akhirnya yang kita perlukan adalah kesepakatan bahwa kesejahteraan petani adalah hal yang utama ("*putting peasants first*") bukan pertumbuhan ekonomi yang utama. Dengan memberdayakan petani, mengutamakan petani atau rakyat diharapkan pengentasan kemiskinan akan berhasil baik ditingkat nagari, kabupaten maupun provinsi.

Catatan Kaki :

- (1) Pengusahaan sub sektor perkebunan di Indonesia dibedakan atas usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha yang kecil dan perusahaan
- (2) Program pengembangan perkebunan rakyat dengan pola UPP dianggap kurang berhasil, dimana faktor penghambat yang sering disebut adalah

daya subisten dan motivasi yang rendah yang melekat dalam diri petani kecil perkebunan rakyat, disamping tidak terjaminnya pemasaran produk.

(3) Secara normatif PIR dimaksudkan agar kesenjangan antara perkebunan besar dan rakyat dalam hal teknologi pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran dapat dihilangkan. Selain itu PIR juga diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah lokasi PIR berada, dan pada akhir Pelita IV pendapatan petani peserta akan mencapai US\$ 1,500 per tahun (Ditjenbun, 1982).

(4) Pemerintah dalam pembangunan pertanian Indonesia sejak awal orde baru tahun 1969 memperlihatkan kecenderungan kearah pengembangan hanya komoditas pangan saja, terutama padi. Keberpihakan ini telah merubah Indonesia dari pengimpor beras terbesar didunia menjadi swasembada pada tahun 1985. Namun perkebunan dengan skala usaha yang relatif besar (Kadiman *et al.*, 1983; Birowo, 1984). demikian pertanyaan pokoknya adalah; Apakah peningkatan

produksi beras yang signifikan telah dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi tersebut?. Godelnsohn (1994) dan van der Eng (1996) memberikan jawaban bahwa petani tanaman pangan menjadi semakin miskin, terlepas dari bagaimanapun bagusnya usahatani mereka, karena keuntungan ekonomis tanaman pangan menurun secara drastis dalam dekade terakhir. Selanjutnya keuntungan usahatani padi akan negatif pada sebagian wilayah Indonesia, jika input dinilai dengan harga riil dan pada harga padi menurut pasaran dunia.

Dengan demikian pembangunan pertanian yang terlalu menekankan pada tanaman pangan, bukanlah kebijakan logis yang masih tetap dilaksanakan di Indonesia. Memberi kebebasan dan memberi bimbingan pada petani untuk menanam komoditi pertanian yang lebih menguntungkan menjadi tanggung jawab pemerintah yang mengutamakan pengembangan ekonomi rakyat (Syarfi, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Sumatera Barat. 2003. Survei Pendapatan Petani, Sensus pertanian 2003
 Dinas perkebunan Sumatera Barat. 2004. Laporan Dinas perkebunan Sumatera Barat tahun. 2003. Padang.
 Eng, Pierre Van Der. 1996. Agricultural Growth in Indonesia. ST. Martin's Prwss America.
 Goldensohn, Max D. et.al. 1994. Participation and empowerment: An assessment of water user association in Asia and Egypt. The irrigation support project for Asia and the near East (ISPAN), Washington, D.C.
 Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia. 1986. Himpunan peraturan untuk landasan operasional Pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Biro hukum dan organisasi Departemen Pertanian. Jakarta. 80 p.
 1992. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan: Pelaksanaan dan penilaian. Dirjen Perkebunan Deptan RI, Tim khusus proyek PIR. Jakarta.
 Geertz, 1976. Involusi Pertanian, LPSP IPB & Yayasan Obor, Jakarta.
 Kadiman, M. Hasan dan LK. Djayastra, 1983. Sejarah perkebunan Indonesia. Agroekonomika. XIV (21): 33-37.
 Korten, David. C., 1983. Social Development, Putting People First, dalam David C. Korten and Felipe B. Alfonso. (eds.), Bureaucracy and The Poor, Clossing The Gap, Mc. Graw Hill International Book Company, Singapore. 1981.
 Mubyarto. 1985. Peranan PIR dalam pengembangan petani pekebun. Perkebunan Indonesia. II (1/2): 71-77
 Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju masyarakat partisipatif.. Kanisius. Yogyakarta.
 Syarfi, Ira wahyuni. 1998. Dampak PIR-Trans terhadap pendapatan dan pola pengeluaran petani peserta. Laporan penelitian BBI. Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
, 2003. Dampak PIR-Trans terhadap masyarakat sekitar, suatu kasus di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, provinsi Sumatera Barat.
, 2004. Perkebunan Rakyat di Sumatera Barat. Draft Disertasi pada Pascasarjana (S3) Unand. Padang.
 Syarfi, Ira wahyuni, Mahdi, dan H.B. Tanjung. 2003. Pelaksanaan pembangunan masyarakat oleh perusahaan perkebunan dan HPH di Sumatera barat. Laporan penelitian. Kerjasama LP Unand dengan Balitbang Sumbar.